

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Afsar, M. (2006). *Mendesain Menagemen Pilkada*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Allan, W. (2006). *Electoral Management Design*. The Internasional Idea Handbook. Idea.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: KKONpress
- Bolgherini, S. (2010). *Participation*. Chicago: The University Of Chicago
- Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, L. (2010). *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Huntington, S. P. dan Joan N. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Imam, M. (2014). *Menengok Prasasti Plumpungan, Cikal Bakal Salatiga*. Merdeka.Com.
- Lutvia, M. (2009). *Pengambilalihan Kota Salatiga Dari Kekuasaan Belanda Ke Pemerintah Indonesia Tahun 1945-1950*. Universitas Negeri Semarang.
- Natabaya, H.A.S. (2008). *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press

- Ramlan, S. Supriyanto, D. Hasyim Asy'ari. (2011). *Menjaga Integritas dan Penghitungan Suara*. Jakarta: Kemitraan.
- Rizkyansyah Ferry. K. (2004). *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*. Catatan Penyelenggara Pemilu
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UU Press
- Soemitro Ronny, H. (1982). *Metodologi Penelitian hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Surbakti, R. Kris Nugroho (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta. Kemitraan Bagian Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Sukanto, I. (2017). *Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga*. Tempo.Com.
- Surbakti, R. Op.sit.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemilihanUmum.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Darerah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Peraturan Komiisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihana Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihana Umum

Kabupaten/Kota, setiap KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 16/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang TataKerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotan Salatiga Nomor 104/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-329537/2016 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 35/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 36/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Panitia Pemilihan Suara (PPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 23/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 55/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 33/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

C. Wawancara

Mulyono, D. (2017, Mei 18). Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kota Salatiga. (A. Rachman Hakim, Pewawancara)

Sutanti, E. (2017, Mei 18). Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2017 di Kota Salatiga. (A. Rachman Hakim, Pewawancara)

D. Jurnal

Abueva, J. (2001). Demokrasi di Indonesia. Demokrasi dan HAM, Vol.1 No.3.

Irawan, B. B. (2007). Perkembangan demokrasi di Indonesia. Hukum dan Dinamika, 54-63.

Syaifuddin, M., Zuhir, M. A., & Yahanan, A. (2010). Demokrasi Peraturan Daerah:

Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/kota di Propinsi Sumatra Selatan. Masalah-Masalah Hukum, 106-118.

Saraswati, R. (2011). Calon Perseorangan Dalam Pilkada. Masalah-Masalah Hukum.

Vol. 40, No. 2.

E. Data On-Line

<http://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 3 Mei 2017

<http://www.kompas.com> diakses pada tanggal 4 Mei 2017

<http://www.kompasiana.com/Hubungan-pemilihan-umum-dengan-Polling>. diakses pada tanggal 7 September 2017

www.kpu.salatiga.go.id, *Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga*, diakses pada tanggal 4 Mei 2017

www.kpu.salatiga.go.id, *Pengundian nomor urut calon walikota dan wakil walikota*, diakses pada tanggal 4 Mei 2017

www.kpu.salatiga.go.id, *Salatiga Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih periode 2017-2022*, diakses pada tanggal 4 Mei 2017

www.kpu.salatiga.go.id diakses pada tanggal 4 Mei 2017

<http://www.kompasiana.com/rohlimohamad/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu>, diakses pada tanggal 6 September 2017

<http://www.kompasiana.com/sejarah-komisi-pemilihan-umum>.diakses pada tanggal 7 September 2017

<http://kpu-salatiga.go.id/evaluasi-penyelenggaraan-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-Salatiga-tahun-2017>

